

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaran pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Andarias, 2015).

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka (Nugraha, 2015).

Berdasarkan Minangkabau News (2015) kota Padang meraih ketegori baik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Renofasi Birokrasi (KemenPAN dan BR) ketegori ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu ketegori CC. Meningkatnya ketegori ini disambut baik oleh Walikota Padang. Meningkatnya ketegori ini dapat diartikan akuntabilitas kinerja Pemko Padang

sudah semakin baik. Menurut sumber yang sama pada tahun 2018, Organisasi Kota Padang (OPD) yang sebelumnya adalah SKPD meraih Predikat A hal ini berkat kinerja dinas terkait yang selalu bersinergi dan bekerjasama menjalankan program-program yang sesuai dengan sasaran anggaran.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dibentuk menjadikan kinerja antar dinas semakin maksimal dan bisa meningkatkan sasaran anggaran yang baik. Selain meningkatkan anggaran OPD kota Padang juga meningkatkan sasaran anggaran pada program pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya Predikat OPD kota Padang diharapkan juga membuat sasaran anggaran yang telah ditetapkan dapat diselenggarakan dan diwujudkan sebagaimana semestinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi maupun tingkat pendidikan yang baik dikalangan ekonomi menengah kebawah (Citra,2016)

Menurut (Helni 2017) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat (Novelina 2014)

Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkisenambungan dengan proses penganggaran. salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah (Magdalena dan Ratnawati, 2014).

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Hidayat 2015).

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan pemantauan dari Wakil Walikota Padang terkait realisasi keuangan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pasar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Pol PP dan Disperindagtamben. Kinerja dari dari kelima OPD ini belum maksimal dikarenakan realisasi keuangan belum mencapai target, maksudnya belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga. Keadaan ini juga membuktikan bahwa kinerja manajerial OPD kota Padang khususnya kelima OPD di atas belum bisa bekerja sesuai dengan harapan. "Pimpinan OPD haruslah orang yang cakap dan memiliki kapabilitas. Tanpa itu, kinerja OPD akan buruk. Baik buruknya kinerja suatu OPD tergantung dari gaya kepemimpinan dari pimpinan.

Adapun penelitian yang dilakukan (Akram, 2016) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan sedangkan tranparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas

se-Kota Semarang. (Baihaqi 2012) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini terletak pada waktu, tempat serta variabel independen yang digunakan, jika pada penelitian terdahulu dilakukan di kota Semarang, maka penelitian yang saya lakukan berada di kota Padang. Menurut PP No.18 pada tahun 2016 Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang. Jumlah OPD berdasarkan peraturan tersebut adalah 22 Kedinasan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam ( Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang), agar anggaran yang telah ditetapkan sesuai kepada sasaran yang dituju.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah ?

- b. Bagaimana Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah ?
- c. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari sudut pandang islam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan ini :

- a. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah kota Padang
- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah kota Padang
- c. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah kota Padang ditinjau dari sudut pandang islam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas YARSI.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependennya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan anggaran dimasa yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.